

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a. Latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diamanatkan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan dalam pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk menyempurnakan sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bitar Tahun 2021-2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Sehubungan dengan dilantikannya Bupati dan Wakil Bupati Blitar periode 2021-2024 yaitu Hj.Rini Syarifah dan H. Rahmat Santoso pada bulan Februari 2021, maka pemerintah kabupaten Blitar memasuki era baru kepemimpinan untuk 5 tahun kedepan. Adapun Bupati memiliki visi-misi yang dituangkan dalam RPJMD yang mengilhami penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya.

Bersamaan dengan itu, perangkat daerah juga menyusun Renstra PD untuk periode tahun 2021-2026 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Blitar dengan memperhatikan penjabaran visi dan misi Bupati dan wakil Bupati serta tupoksi perangkat daerah. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra ini juga mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan terkait, baik vertikal maupun horisontal. Secara vertikal Renstra ini mengacu kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Sedangkan secara horizontal mengacu pada KLHS Kabupaten, Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Blitar 2021-2026 dan dokumen perencanaan lainnya yang telah disusun dan ditetapkan di Kabupaten Blitar. Maksud dirujuknya semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal dan horizontal antar Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak dalam penyelenggaraan organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal organisasi disusun dengan melibatkan stakeholder pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Blitar. Renstra juga merupakan dasar penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sekurangnya memperhatikan/ mengacu pada perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi dan perspektif harapan pelanggan pengguna layanan dinas kami.

Sehubungan dengan dilantikannya Bupati dan Wakil Bupati Blitar periode 2021-2024 yaitu Hj.Rini Syarifah dan H. Rahmat Santoso pada bulan Februari 2021, maka pemerintah kabupaten Blitar memasuki era baru kepemimpinan untuk 5 tahun kedepan. Adapun Bupati memiliki visi-misi yang dituangkan dalam RPJMD yang mengilhami penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya.

Adapun Visi dan Misi Bupati Blitar terpilih adalah :

Visi : ***“Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia. Baldatun, Toyyibbatun, Warobbun Ghofur.”***

Misi :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya;

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar;
3. Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas;
4. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Adapun nilai-nilai visi dan misi Bupati terpilih ini diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang disebut dengan Panca Bhakti yang terdiri atas :

1. Jaminan pendidikan masyarakat desa
2. Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan ibu dan anak
3. Pelayanan public berbasis *e-government*
4. Pengembangan potensi ekonomi daerah
5. Pesona Blitar Raya

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang mendukung ***misi ke-3 yaitu pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas*** untuk kemudian mendukung tercapainya salah satu indikator tujuan RPJMD yaitu Indeks Reformasi Birokrasi yang dibagi ke dalam dua sasaran utama yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa yang dicapai dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dicapai dengan indikator :
 - a. Nilai SAKIP
 - b. Indeks Profesionalisme Aparatur
 - c. Indeks SPBE
 - d. Indeks Inovasi Daerah dan
 - e. Persentase Desa Mandiri

Dari penjabaran sasaran ke dua RPJMD dan indikatornya terlihat jelas bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mendukung pencapaian Indeks SPBE Kabupaten Blitar. Sedangkan terkait program Panca Bhakti yang juga linier dengan RPJMD dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian mendukung Panca Bhakti ke-3 yaitu *pelayanan publik berbasis e-government* yang tergambar dalam konsep program Internet Sambung Desa.

b. Pengertian dan Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Sesuai Permendagri 86 tahun 2017, pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dengan berakhirnya RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021, dan disusunnya RPJMD Kabupaten Blitar periode 2021-2025 maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyusun renstra tahun 2021-2025 dengan berdasarkan pada RPJMD yang baru. Sesuai pasal 16 Permendagri 86 tahun 2017 tahapan penyusunan renstra adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra OPD;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra OPD;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra OPD;
4. Penyusunan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir;
6. Penetapan Renstra OPD.

Berikut adalah penjelasan rangkaian Penyusunan Rencana Strategis OPD :

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra OPD

Tahapan persiapan penyusunan Renstra OPD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra OPD yaitu :

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra OPD.

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD yaitu mencakup :

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; - 57 -
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

3. Peyusunan Rancangan Akhir Renstra OPD

Dalam tahap ini Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dimana hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dituangkan kedalam Berita Acara kesepakatan Rancangan Akhir Renstra OPD. Tahap selanjutnya adalah dilakukan verifikasi oleh Bappeda dan apabila ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

4. Penyusunan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra OPD

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

6. Penetapan Renstra OPD

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada BAPPEDA untuk diverifikasi dan disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Kementrian Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementrian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;

17. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2013;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar (RPJMD) Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 110 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

a. Maksud :

- Memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar selama jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

b. Tujuan :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan;
3. Manjadi instrumen pengukuran kinerja sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;

4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan RKA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

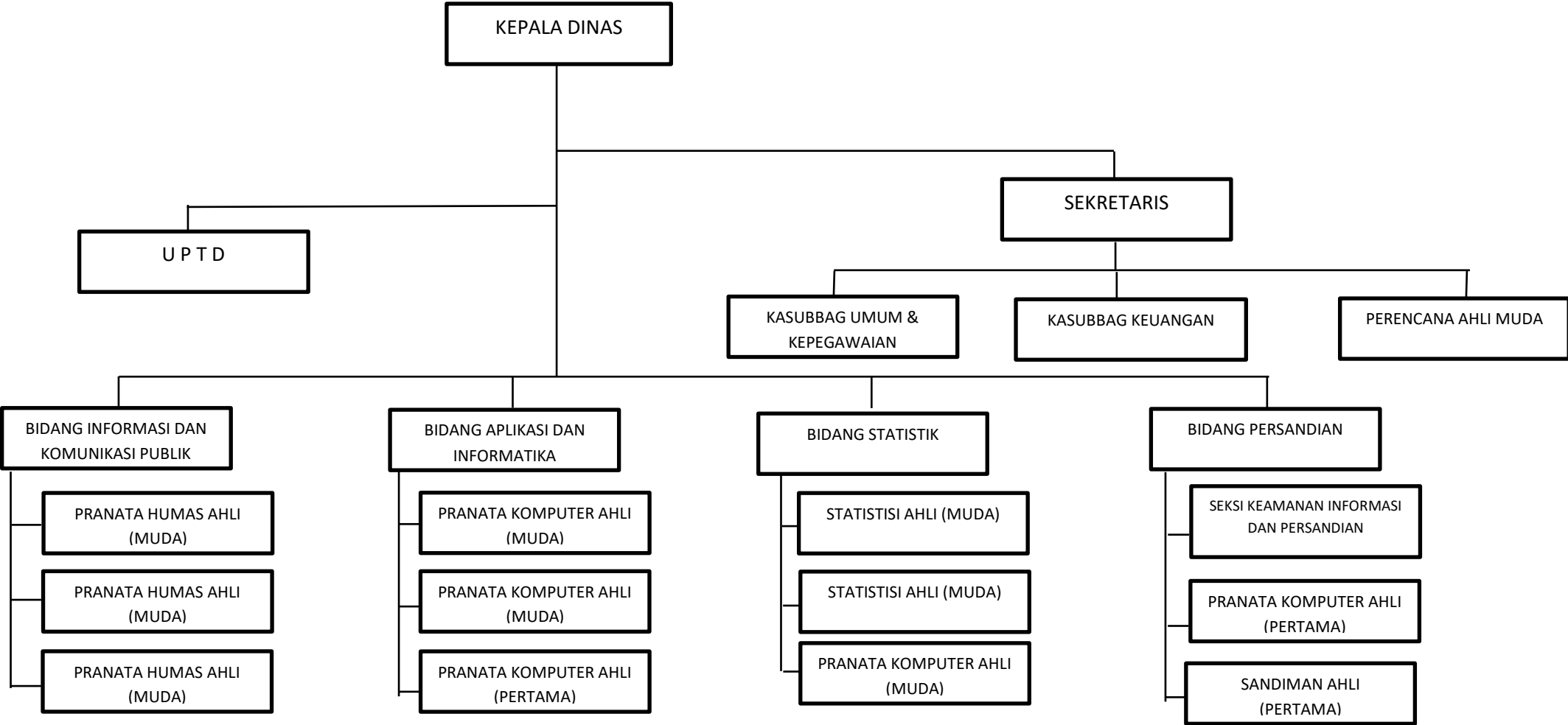
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Blitar Nomor 110 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian ;
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian ;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian sesuai Peraturan Perundang-undangan
 - e. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
 - f. Pelaksanaan Tugas Dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berikut adalah Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 110 Tahun 2022.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian perumusan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, data dan statistik;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, data dan statistik;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- e. pembinaan UPTD; dan
- f. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas-tugas sekretariat, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sekretariat;
- b. Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;

- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- g. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non-yustisia) dibidang kepegawaian;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan tugas bidang;
- k. Pengelolaan kearsipan;
- l. Pelaksanaan pemanataan serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- m. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugasnya membawahi :

2.1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- h. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- i. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengelolaan opini publik, sumber daya komunikasi publik, kemitraan komunikasi, layanan informasi publik, pengelolaan informasi publik dan media publik.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. Pelaksanaan pemantauan informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- c. Penyediaan konten dan pengelolaan media komunikasi publik;
- d. Pengelolaan pelayanan informasi publik, layanan hubungan media dan kerja sama kehumasan;
- e. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
- f. Pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat dan keterbukaan publik;
- g. Pengelolaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- h. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Aplikasi dan Informatika

Bidang Informatika mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan *e-Government* dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi, proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik dan ekosistem pemerintahan berbasis elektronik, pengembangan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten Cerdas;
- b. Pelayanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dalam implementasi *e-government*;
- c. pelayanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pemeliharaan, pengendalian infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pengelolaan pusat data Pemerintah Daerah;
- e. pelayanan pengembangan aplikasi, proses bisnis pemerintah berbasis elektronik dan ekosistem sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- f. pelayanan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.
- g. Penatalaksanaan dan pengawasan *e-government* dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- h. Pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik;
- i. Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah;
- j. Pengelolaan *government chief information office*;
- k. Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten Cerdas; dan
- l. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas

5. Bidang Statistik

Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Statistik mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan di bidang statistik;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang statistik;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang statistik;
- d. pemutakhiran data pada pelaksanaan kebijakan di bidang statistik;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan;
- f. pengoordinasian, konsultasi, dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang;
- g. pelaksanaan diseminasi, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan rencana kerja bidang;
- h. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
- i. peningkatan kapasitas kelembagaan statistik;
- j. pengembangan infrastruktur pendukung statistik sektoral;
- k. penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

6. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang persandian dan keamanan informasi yang meliputi merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan persandian dan keamanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Persandian dan Keamanan Informasi menyelenggarakan Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- c. pelaksanaan perencanaan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi

- sandi antar Perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *data center*, *disaster recovery center* dan *government cloud computing*;
 - e. pelaksanaan pelayanan interkoneksi jaringan intra pemerintah dan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
 - f. pelaksanaan pelayanan pemantauan traffic elektronik;
 - g. pelaksanaan pelayanan keamanan informasi pada sistem elektronik Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan keamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
 - i. pelaksanaan pemantauan keamanan informasi pada sistem elektronik Pemerintah Daerah;
 - j. pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi;
 - k. pelaksanaan layanan filter konten negatif serta penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
 - l. pelaksanaan pelaporan dan pelaksanaan rencana kerja; dan
 - m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain diberikan Kepala Dinas.

7. Seksi Persandian

Seksi Persandian mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan persandian untuk pengamanan informasi;
- b. pelaksanaan pelayanan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi, pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi milik Pemerintah Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional sandiman;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras infrastruktur dan persandian;
- e. pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui metode pengamanan persandian lainnya;
- f. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi tata kelola persandian dan operasional pengamanan informasi;
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa Jabatan Fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduduki oleh Pejabat Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris atau Kepala Bidang.
- f. Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Sekretaris atau Kepala Bidang
- g. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur dan tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- a. UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas.
- b. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.

- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Untuk menjalankan sebuah organisasi butuh sumber daya yaitu berupa Personil dan peralatan serta perlengkapan sebagai media untuk melaksanakan pelayanan di OPD, tanpa sumberdaya maka pelayanan yang ada di OPD mustahil dapat dilaksanakan. Berdasarkan data kepegawaian yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar sampai dengan bulan November 2022, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar sebanyak 60 (enam puluh tujuh) orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, Tenaga Kontrak Kerja sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang.

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Menurut Golongan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Uraian	Golongan/PNS								Jumlah		Total
		I		II		III		IV				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Kepala Dinas			1						1		1
2	Sektetariat					1				1		1
3	Bidang Informatika					1				1		1
4	Bidang Informasi Komunikasi Publik					1				1		1
5	Bidang Data dan Statistik								1		1	1
6	Bidang Persandian					1				1		1
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian								1		1	1
7	Kepala Sub Bagian								1		1	1

No	Uraian	Golongan/PNS								Jumlah		Total
		I		II		III		IV				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	Keuangan											
8	Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama					1		1		2		2
9	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama							2		2		2
10	Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Muda							2		2		2
11	Seksi Persandian							1		1		1
	Jumlah ASN			1		5		6		12	3	15
17	Staf /JFT									9	5	14
18	Tenaga Kontrak									17	14	31
	Jumlah Keseluruhan											60

Sedangkan untuk rincian aset yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Rincian Aset Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Per 31 Desember 2020

No	Kode Barang	Nilai BMD Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
A	Aset Tetap	6.981322528,30	80.067.600,00	7.061.390.128,30
	1 Tanah	-	-	-
	2 Peralatan dan Mesin	6.685.778.061,30	170.041.600,00	6.855.819.661,30
	3 Gedung dan Bangunan	295.544.467,00	(89.974.000,00)	205.570.467,00
	4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	5 Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	6 KDP	-	-	-
B	Aset Lainnya		60.000.000,00	

No	Kode Barang	Nilai BMD Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
		644.536.863,00		704.536.863,00
	1 Aset Rusak Berat	-	60.000.000,00	60.000.000,00
	2 Aset Tak Berwujud	644.536.863,00	-	644.536.863,00
C	Jumlah Aset Tetap dan Aset Lainnya	7.625.859.391,30	140.067.600,00	7.765.926.991,30
D	Ekstrakompetable	1.410.000,00		1.410.000,00

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Kinerja Perangkat Daerah

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bitar, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika sebelumnya di jalankan oleh 2 (dua) OPD yaitu :

- 1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bitar (Bidang Komunikasi dan Informatika) ;
- 2. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bitar ;

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bitar pada akhir tahun 2016, kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika, dan Persandian pada kedua OPD tersebut berpindah ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar sekaligus mengalami penambahan satu bidang yakni Data dan Statistik.

Dalam pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dapat diinventarisir beberapa faktor pendorong dan penghambat tercapainya kinerja perangkat daerah, yaitu :

Faktor Pendorong :

- 1. Adanya Peraturan Bupati Blitar tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- 2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal;
- 3. Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal;

4. Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut pemerataan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
5. Adanya sarana dan prasarana sebagai modal utama pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

1. Pandemi covid-19 menyebabkan permintaan fasilitasi yang overload sehingga sumber daya manusia tidak sebanding dengan beban tugas dan kurang fokus dalam menjalankan tupoksi utama dinas;
2. Kurang meratanya kemampuan IT sumber daya manusia pada dinas dan terbatasnya sarana dan prasarana/peralatan menyebabkan kurang maksimalnya pencapaian kinerja;
3. Terbatasnya regulasi yang mengatur pengembangan TIK, informatika dan telekomunikasi;
4. Terkait implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) masih ditemukan beberapa kendala mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan serta review yang belum maksimal;
5. Terkait pepadanan data untuk menuju Satu Data Indonesia, masih banyak terdapat permasalahan pepadanan dan pemanfaatan data lintas sektoral di lingkup pemerintah daerah kabupaten Blitar.

Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar pada tahun 2017 sampai dengan 2020 dapat digambarkan dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya masyarakat yang dapat mengakses informasi	90%	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	111,11%	0	0	0	0
2	Meningkatnya keamanan sistem persandian	100%	100%	0	0	0	100%	0%	0	0	0	100%	0%	0	0	0
3	Meningkatnya validitas data pembangunan daerah yang tepat waktu	90%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	100%	0	111,11%	100%	100%	100%	0
4	Meningkatnya komunikasi dan informasi pembangunan daerah	0	A	A	A	0	0	A	A	A	0	0	100%	100%	100%	0
5	Meningkatnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	0	85%	86,4%	86,4%	0	0	92,27%	87,03%	87,03%	0	0	108,56%	100,72%	100,72%	0
6	Meningkatnya informasi tentang ketentuan di bidang cukai yang disebarluaskan kepada masyarakat	0	100%	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	100%	0	0	0

Dari tabel pencapaian kinerja layanan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya masyarakat yang dapat mengakses informasi, rata-rata capaian kinerja dalam tahun pertama adalah 111,11% dan untuk selanjutnya tidak dihitung capaiannya sampai akhir periode renstra;
2. Meningkatnya keamanan sistem persandian, rata-rata capaian kinerja untuk 2 tahun pertama adalah 50% sedangkan untuk periode selanjutnya tidak dihitung sampai dengan akhir periode renstra;
3. Meningkatnya validitas data pembangunan daerah yang tepat waktu, rata-rata capaian kinerja dalam 4 tahun adalah 102,78%
4. Meningkatnya komunikasi dan informasi pembangunan daerah, rata-rata capaian kinerja dalam 3 tahun (2018-2020) adalah 100%, sedangkan untuk 2 tahun pertama periode awal renstra belum dilakukan penghitungan capaian indikator ini;
5. Meningkatnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, rata-rata capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun (2018 s/d 2020) adalah 103,3%;
6. Meningkatnya informasi tentang ketentuan di bidang cukai yang disebarluaskan kepada masyarakat, rata-rata capaian kinerjanya adalah 100% dimana hanya dihitung untuk tahun 2018.

Kinerja utama yang pertama adalah meningkatnya masyarakat yang dapat mengakses informasi, dengan target capaian kinerja indikator yaitu rasio tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan target sebesar 90% dengan definisi operasional adalah pengaduan masyarakat yaitu : permintaan informasi pembangunan daerah yang masuk melalui desk PPID Kabupaten Blitar sejumlah 8 sedangkan pada tahun 2017 ada sebanyak 8 yang keseluruhannya sudah ditindaklanjuti, sehingga dari target 90% tercapai 100% maka capaiannya adalah 111,11% dimana seluruh permohonan informasi sudah ditindaklanjuti.

Indikator kinerja yang kedua adalah meningkatnya keamanan sistem persandian yang diukur pada 2 tahun pertama periode renstra dimana rasio capaiannya adalah sebesar 50% nilai ini didapat dari target tahun pertama dan ke dua sebesar 100% akan tetapi hanya dapat mencapai target di tahun pertama saja. Adapun yang dimaksud berita sandi yang diamankan adalah keseluruhan berita sandi yang diterima, diterjemahkan, dan disampaikan dengan aman dan tetap terjaga kerahasiaannya kepada tujuan berita, dimana pada tahun 2017 ada 25 berita sandi yang keseluruhannya dapat disampaikan dengan aman. Sedangkan pada tahun 2018 sandiman di kabupaten Blitar

telah purna tugas di trubulan pertama sehingga selanjutnya sampai dengan akhir tahun 2018 tidak ada berita sandi yang dikirimkan ke kabupaten Blitar.

Indikator kinerja utama selanjutnya adalah meningkatnya validitas data pembangunan daerah yang tepat waktu, dimana indikator ini diukur setiap tahun selama periode renstra dan memiliki rasio capaian kinerja 102,78% yang menggambarkan bahwa kinerjanya telah tercapai dengan baik yang berarti produk-produk statistik terkait data pembangunan telah direlease tepat waktu dan valid diantaranya : Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Blitar, Distribusi Pendapatan, Blitar Dalam Angka, Modul Statistik Dasar dan Perhitungan Statistik Sektor, ICOR, IKLI, IKS dan lain sebagainya.

Indikator kinerja utama ke empat adalah meningkatnya komunikasi dan informasi pembangunan daerah yang dihitung ,mulai tahun 2018 sampai dengan 2020 dengan rata-rata capaian kinerjanya 100% yang berarti bahwa nilai/predikat PPID Awards yang setiap tahun diadakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur merupakan formula yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 PPID Kabupaten Blitar yang dikelola oleh Dinas Kominfo memperoleh predikat A (sangat terbuka). Di tahun 2019 Komisi Informasi melakukan penyesuaian untuk beberapa kriteria dalam PPID award, dan dinas Kominfo memperoleh prestasi berupa Badan Publik Menuju Inovatif. Keberhasilan pencapaian kinerja ini merupakan keberhasilan seluruh PPID kabupaten Blitar meskipun demikian masih diperlukan perbaikan kinerja kedepannya.

Indikator kinerja utama selanjutnya yang merupakan core bisnis utama dinas Kominfo adalah meningkatnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dengan rata-rata capaian kinerjanya adalah 103,3% dengan definisi operasional adalah persentase OPD dan ruang publik yang terkoneksi internet dan terintegrasi. Pertumbuhan mulai tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan yang cukup positif. Dimana pada tahun 2018 capaiannya sebesar 92,27% dari target 85% berarti telah ada 137 titik koneksi internet yang mengintegrasikan sejumlah 59 OPD dan 95 ruang pelayanan publik/area publik. Tahun 2019 sampai 2020 definisi operasionalnya dikembangkan menjadi persentase sistem informasi yang aktif karena pada tahun 2018 hampir semua titik telah terkoneksi internet. Target sistem informasi yang aktif di tahun 2019 adalah 86,4% dan tercapai 97,03% sedangkan di 2020 dari target 100% telah tercapai 97,08%. Pencapaian kinerja yang cukup maksimal ini juga didorong oleh meningkatnya responsifitas OPD di kabupaten Blitar untuk meningkatkan implementasi SPBE dalam

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, disamping itu juga banyaknya inovasi yang bermunculan menjadi salah satu faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini.

Untuk indikator kinerja utama yang terakhir adalah meningkatnya informasi tentang ketentuan di bidang cukai yang disebarluaskan kepada masyarakat. Dengan target 100% telah berhasil dicapai 100% dalam hal ini dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memperoleh Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) yang diperuntukkan guna publikasi pemanfaatan dana cukai tembakau. Seluruh OPD yang mengelola dana ini mempublikasikan kegiatannya melalui dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Pada tahun 2018, seluruh permintaan publikasi dari OPD pengelola DBHCHT telah dapat diakomodir oleh dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Keberhasilan pencapaian indikator ini merupakan wujud nyata pelaksanaan tugas publikasi yang mampu dijalankan dengan baik oleh dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Untuk capaian program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar tahun 2017 sd 2021 secara umum juga berhasil dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan Program/Kegiatan tersebut selalu dilakukan review apakah dalam tahun bersangkutan terdapat program/kegiatan yang harus segera dilaksanakan mengingat kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar juga mengacu pada kebijakan pemerintah daerah yang terkadang mengalami rasionalisasi atau perubahan yang sedikit banyak juga mempengaruhi pencapaian kinerja perangkat daerah.

Dalam rentang waktu tahun 2018 sampai dengan 2020 dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan 8 (delapan) program yang terurai dalam 12 kegiatan. Adapun pelaksanaan capaian program/kegiatan selama rentang 5 (lima) tahun yang lalu adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja program persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran capaian kinerja rata-rata dalam 8 (delapan) tahun adalah (100%) dan indikator kinerja kegiatan adalah pemenuhan 5 jenis kebutuhan rutin rata-rata capaian kinerja dalam 5 (lima) tahun adalah 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerja program Persentase Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak fungsi capaian kinerja rata-rata dalam 5 (lima) tahun adalah (98,85%) dan indikator kinerja kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana perkantoran dlm kondisi baik capaian kinerja rata-rata dalam 5 (lima) tahun adalah 98,85%.
3. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan serta Kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran dan laporan Keuangan dengan indikator kinerja program persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja OPD yang tepat waktu capaian kinerja rata-rata dalam 5 (lima) tahun adalah (100%) dan indikator kinerja kegiatan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu capaian kinerja rata-rata dalam 5 (lima) tahun adalah (100%)
4. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator kinerja program Persentase Informasi Publik yang disediakan adalah 100% (tercapai) sedangkan indikator ke dua yaitu Persentase Lembaga Informasi Publik yang sesuai dengan fungsinya dari target 28% belum tercapai kinerjanya dikarenakan belum diukur secara rutin pertahun. Adapun kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini adalah :
 - Pengelolaan Media Komunikasi dimana indikator kinerja Jumlah media komunikasi (KIM, Media Cetak, Media Elektronik) dari target 3 terealisasi 4;
 - Pengelolaan Layanan Informasi dimana indikator kinerja cakupan layanan informasi (optimalisasi PPID) dari target 100% mencapai 100%;
 - Pengelolaan Informasi dan Opini Publik dimana indikator kinerja persentase informasi yang diklarifikasi dari target 100% tercapai 100%.
5. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK dengan indikator kinerja program Persentase aplikasi yang ada di pemerintah kabupaten Blitar dari target 95% tercapai 96,3% sedangkan indikator ke dua adalah Persentase area publik dan OPD yang sudah terkoneksi internet dan intranet dan terintegrasi dari target 95,1% tercapai 95,33%, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di program ini adalah:

- Pengembangan aplikasi dan tata kelola e-government dimana indikator kinerja Jumlah aplikasi pemerintah yang dibangun dari target 3 tercapai 11 dan Jumlah dokumen/kajian SOP yang diterbitkan dari target 2 tercapai 4;
 - Peningkatan Sumber Daya TIK dimana indikator Jumlah website resmi pemerintah daerah yang terkelola dari target 60 OPD tercapai 60 OPD, sedangkan Jumlah peserta sosialisasi dari target 240 tercapai 180;
 - Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK dan jaringan komunikasi informasi dengan indikator Jumlah OPD yang terhubung jaringan internet dan intranet dan terintegrasi dari target 139 tercapai 139.
6. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Data dan Statistik dengan indikator persentase ketersediaan data pembangunan tepat waktu dari target 90% tercapai 100% adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di program ini adalah :
- Koordinasi penyusunan dan publikasi data pembangunan daerah dengan indikator kinerja jumlah dokumen statistik yang disusun dari target 3 tercapai 3 sedangkan jumlah peserta capacity building penyusunan database sektoral dari target 60 terealisasi 60;
 - Pengolahan, pemutakhiran dan analisis data dan statistik daerah dengan indikator kinerja jumlah buku informasi data dari target 1 tercapai 1 sedangkan jumlah pemutakhiran informasi pembangunan dari target 2 tercapai 2.
7. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan indikator kinerja program Persentase berita sandi yang diamankan dari target 100% rata-rata capaian kinerjanya adalah 50% dikarenakan tidak ada berita sandi yang masuk dan telah bergeser pada indikator jumlah sistem informasi yang diamankan dengan persandian Pada Program ini kegiatan yang dilakukan adalah :
- Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dari target 100% rata-rata capaiannya adalah 50% disebabkan peralihan indikator dari berita sandi yang diterima menjadi pengamanan informasi yang masih membutuhkan perbaikan kinerja kedepannya.
8. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dengan indikator program persentase publikasi ketentuan di bidang cukai dari target 100% rata-rata capaian kinerjanya adalah 100%, dari sini dapat dilihat bahwa tulus publikasi

pada dasarnya mampu terlaksana dengan baik. Pada Program ini kegiatan yang dilakukan adalah :

- Penyampaian informasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan dengan indikator kinerja persentase informasi yang disampaikan terkait cukai dari target 100% rata-rata capaiannya adalah 100% karena seluruh publikasi telah dapat diakomodir dengan baik.

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama OPD, Program maupun Kegiatan tahun 2017 sd 2020 yang cukup baik ini didukung oleh komitmen yang kuat dari kepala dinas dan seluruh jajarannya untuk melaksanakan pelayanan publik semaksimal mungkin guna mendukung perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) guna mengemban Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih terutama Misi ke 4 (empat), yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi.

b. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Pagu Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dari Tahun 2017 sampai dengan 2020 adalah sebesar Rp. 40.601.924.400,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 39.777.339.839,-

Untuk lebih jelasnya data terkait anggaran dan realisasi anggaran beserta pertumbuhan dan rasio capaian anggaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Blitar

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
2017-2020																		
1	Belanja Tidak Langsung	27.457.537,-	-	-	500.000.000,-	-	27.457.537,-	-	-	496.741.800,-	-	100%	-	-	99,3%	-		
2	Belanja Langsung (Belanja Operasi)	4.025.998.500,-	8.495.073.540,-	12.368.627.900,-	12.290.360.863,-	-	4.013.178.253,-	8.288.979.407,-	12.037.030.698,60	12.194.123.950,-	-	99,7%	97,5%	97,3%	99,2%	-		
	Belanja Pegawai	145.290.000,-	1.506.790.400,-	2.705.603.850,-	2.568.702.850,-	-	144.190.000,-	1.469.682.670,-	2.515.588.020,-	2.526.543.151,-	-	99,2%	97,5%	92,9%	98,3%	-		
	Belanja Barang Jasa	2.869.557.498,-	6.988.283.140,-	9.663.024.050,-	9.221.658.013	-	2.861.175.333,-	6.819.296.737,-	9.521.442.678,-	9.170.838.999,-	-	99,7%	97,5%	98,5%	99,4%	-		
	Belanja Modal	1.011.151.002,-	1.856.536.860,-	2.009.569.950,-	77.450.000,-	-	1.007.812.920,-	1.795.808.610,-	1.999.028.896,-	77.086.600,-	-	99,6%	96,7%	99,4%	99,5%	-		
2021																		
1																		
2																		
3																		
4																		

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar mengalami penurunan pada tahun 2019 ke 2020 dikarenakan refocussing anggaran oleh pemerintah daerah guna penanggulangan pandemi covid-19 yang membutuhkan suntikan dana cukup besar bagi pemulihan perekonomian masyarakat.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar

Untuk mencapai tujuan, baik untuk jangka pendek atau pun jangka panjang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar melakukan analisis tentang tantangan pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar untuk 5 (lima) tahun ke depan. Adapun gambaran tantangan dan peluang pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar salah satunya diperoleh dari hasil analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun mendatang, hasil analisis terhadap KLHS adalah sebagai berikut :

RUMUSAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMECAHAN PERMASALAHAN/ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar

NO	ISU STRATEGIS RANTEK RPJMD 2021-2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM (OUTCOME)	PENJELASAN/ JUSTIFIKASI
1	2	3	4	5	6
1.	Tantangan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Meningkatkan Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyediaan infrastruktur teknologi informasi, dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi	Penguatan Tatakelola SPBE, infrastruktur, dan sumber daya teknologi informasi	Indeks SPBE Pemerintah Daerah	Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2019 sebesar 2,9 dengan Kategori Baik, sehingga perlu ditingkatkan ke level Sangat Baik (3,5 – 4,2) hingga Memuaskan (4,2 – 5,0)

--	--	--	--	--	--

**PEMETAAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN OUTPUT SPESIFIK
PEMECAHAN PERMASALAHAN/ISU STRATEGIS
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022**

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Blitar

INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM (OUTCOME)	PROGRAM (PMDN No. 90 TAHUN 2019)	KEGIATAN (PMDN No. 90 TAHUN 2019)	OUTPUT	SUB KEGIATAN (PMDN No. 90 TAHUN 2019)	OUTPUT SPESIFIK
1	2	3	4	5	6
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Pengelola an Nama Domain yang telah Ditetapk an oleh Pemerint ah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerint ah Daerah Kabupate n/Kota 2. Pengelola an e-governme nt Di Lingkup Pemerint ah Daerah Kabupate n/Kota	Tersedian ya infrastruk tur SPBE terintegra si Tersedian ya Tatakelola SPBE, Aplikasi SPBE, serta implement asi dan monitorin g SPBE	Penyelenggara an Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 1. Pengemba ngan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerint ah an Berbasis Elektronik 2. Pengemba ngan dan Pengelolaa n Sumberday a Teknologi Informasi dan Komunikas i Pemerintah Daerah	Jaringan terintegrasi dan infrastruktur TIK untuk layanan SPBE 1. Aplikasi SPBE 2. Tatakelola SPBE (Master Plan, Regulasi, dan Tim SPBE) 1. Sosialisasi , Workshop, Implement asi SPBE 2. Pemberday aan dan Peningkat an Kapasitas RTIK, Pandu Digital, Saka Kominfo

--	--	--	--	--	--

Dari hasil analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dapat digambarkan tantangan dan peluang yang dimiliki dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dalam tabel sebagai berikut :

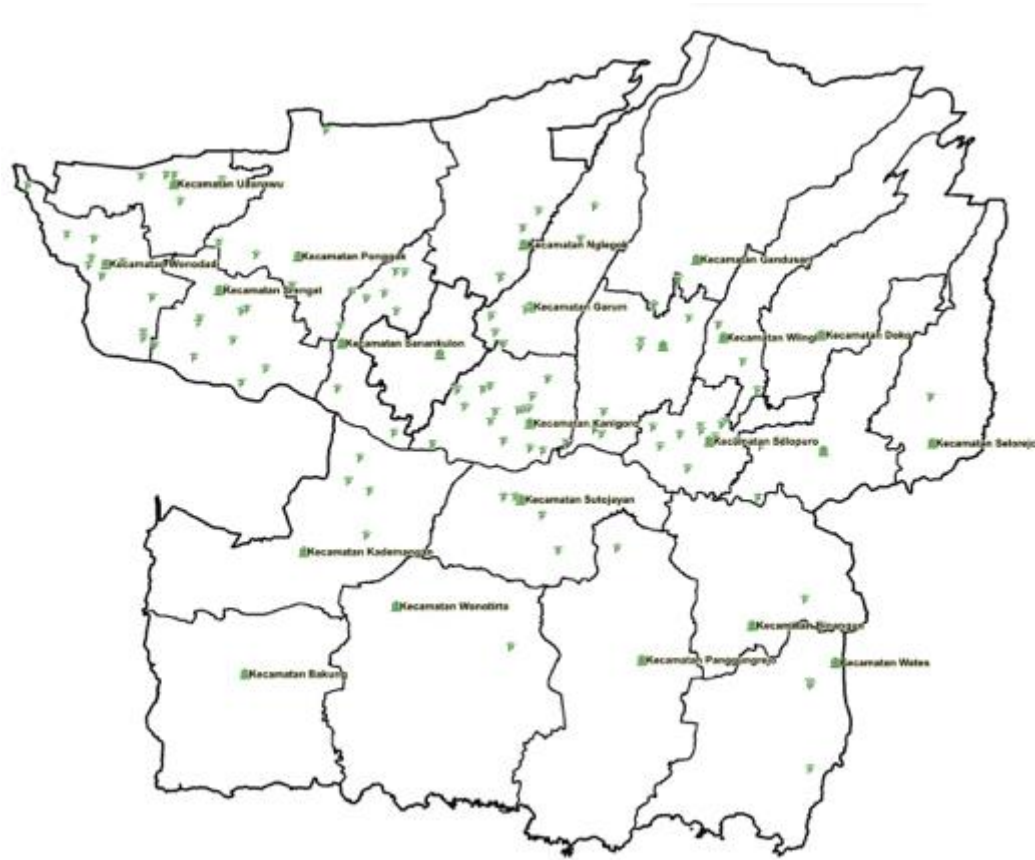
Tabel. 2.4.
Tabel Tantangan dan Peluang dalam pengembangan pelayanan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar

TANTANGAN	PELUANG
1. Belum optimalnya penyelenggaraan <i>e-government</i> ; 2. Pengelolaan website Pemerintah Kabupten dan Perangkat daerah terintegrasi dan terupdate ; 3. Konten hoax yang beredar di masyarakat ; 4. Semakin cerdasnya masyarakat terkait kebutuhan akan informasi (Keberadaan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik; 5. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi ; 6. Jaminan keamanan sistem TIK; 7. Belum tersedianya satu data yang terintegrasi ; 8. Masih rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional khususnya yang menguasai	1. Kemajuan teknologi informasi ; 2. Keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh informasi ; 3. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat ; 4. Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat (komunikasi) 5. Media massa, elektronik dan online yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta ; 6. Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif ; 7. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara. 8. Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf;

TANTANGAN	PELUANG
bidang IT (Analisis, Aplikasi, Database, Pemograman dan Jaringan).	

Berdasarkan hasil analisis KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dan tabel tantangan dan peluang dalam pengembangan layanan dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dapat digambarkan perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan, disamping titik-titik fasilitas umum dan OPD yang telah terhubung jaringan internet dan intranet dan terintegrasi berikut adalah sebagian arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dinas guna menunjang pencapaian sasaran strategis RPJMD yang terkait dengan program internet sambung desa :

DAFTAR PENAMBAHAN JARINGAN FASILTAS UMUM



NO	TITIK LOKASI	ALAMAT	TITIK KOORDINAT	
1	Kecamatan Sutojayan			
a.	Pasar Sutojayan	Jl. Raya Barat., Wonorejo, Kalipang, Kec. Sutojayan, Blitar	-8,1702	112,2156
b.	Alon Alon Sutojayan	Jl. Raya Barat No.52, Wonorejo, Kalipang, Kec. Sutojayan, Blitar	-8,1699	112,2157
c.	Masjid Lodoyo	Jl. Raya Utara Lodoyo No.94, Brubuh, Kalipang, Kec. Sutojayan, Blitar	-8,1682	112,2176
d.	Pondok Pesantren Nurul Ulum	Jl. Diponegoro No.105, Dadapan, Kedung Bunder, Kec. Sutojayan, Blitar	-8,1679	112,2071
e.	Lapangan Brubuh	Kalipang, Kec. Sutojayan, Blitar	-8,1617	112,2182

NO	TITIK LOKASI	ALAMAT	TITIK KOORDINAT	
2	Kecamatan Wlingi			
a.	Pasar Wlingi	Gurit, Babadan, Kec. Wlingi, Blitar	-8.0757	112.3274
b.	RTH Wlingi	RTH Wlingi, Jl. Bromo, Kel. Beru Kec. Wlingi	-8,0815	112,3247
c.	Masjid Miftakhul Jannah, Wlingi	Jl. Panglima Sudirman No.26, Ngambak, Beru, Kec. Wlingi, Blitar	-8.0843	112.3118
d.	Gereja Katolik St. Peter & Paul Wlingi	Jl. Bromo, Gurit, Babadan, Kec. Wlingi, Blitar	-8,0802	112,3251
e.	Lapangan Kenongo Wlingi	Jl. Yos Sudarso, Ngambak, Beru, Kec. Wlingi, Blitar	-8,0886	112,316

NO	TITIK LOKASI	ALAMAT	TITIK KOORDINAT	
3	Kecamatan Srengat			
a.	Pasar Srengat	Jl. Raya Dandong Srengat, Dandong, Kec. Srengat, Blitar	-8,0629	112,0704
b.	Masjid YAMP Al Ittihad Srengat	Kelurahan Togogan, Kec. Srengat, Blitar	-8,0592	112,0546
c.	Lapangan Srengat	Srengat, Kec. Srengat, Blitar	-8,0597	112,0721
d.	Pondok Al Hikmah	Dandong, Kec. Srengat, Blitar	-8,0728	112,0726
e.	GPdI Maranatha Srengat	Jl. Raya Kediri - Blitar No.48, Srengat	-8,0624	112,0659

NO	TITIK LOKASI	ALAMAT	TITIK KOORDINAT	
4	Kecamatan Kademangan			
a.	Pasar Kademangan	Jl. Raya Trisula No.9, Kademangan	-8,1432	112,1452
b.	Masjid Jami At-Taqwa	Jl. Raya Trisula No.16, Kademangan	-8,1468	112,1428
c.	Gereja Katolik Santo Petrus	Jl. Raya Trisula No.8 Sumberjati, Krajan, Sumberjati, Kec. Kademangan	-8,1758	112,1098
d.	Pondok Pesantren Darul Ulum Watesprojo	Jl. Raya Masjid Baitul Amin No.9, Krajan, Sumberjo, Kec. Kademangan	-8,1781	112,1078
e.	Lapangan Kademangan	Jl. Arjuno No.21, Kademangan, Kec. Kademangan, Blitar	-8,1414	112,144

NO	TITIK LOKASI	ALAMAT	TITIK KOORDINAT	
5	Kecamatan Nglegok			
a.	Pasar Nglegok	Jl. Raya Nglegok, Nglegok 1, Nglegok, Blitar	-8,0354	112,2174
b.	Stadion Gelora Penataran	Nglegok, Blitar	-8,0389	112,2176
c.	Masjid Jami' MUSTAWAN Nglegok	Jl. Raya Penataran No.39, Selorejo, Nglegok	-8,0297	112,2158
d.	Pondok Pesantren Syekh Subakir	Selorejo, Nglegok, Blitar	-8,0286	112,2162
e.	PIPP Penataran	Penataran, Nglegok	-8,0147	112,2087
f.	Kolam Renang Penataran	Jl. Raya Penataran No.11, RW.06, Penataran, Nglegok	-8,0132	112,2083
g.	Museum Panataran	Jl. Raya Penataran No.11, Penataran, Nglegok	-8,0125	112,2089

NO	TITIK LOKASI	ALAMAT	TITIK KOORDINAT	
6	Kecamatan Gandusari			
a.	Pasar Gandusari	Gandusari, Blitar	-8,0461	112,3057
b.	Pondok Pesantren jati sanan	Kamulan, Kec. Talun, Blitar	-8,0749	112,2885
7	Kecamatan Garum			
a.	Pasar Garum	Ngebra, Tawangsari, Kec. Garum, Blitar	-8,0728	112,2165
b.	Taman Sukarni-Garum	Tawangbrak, Ngebra, Tawangsari, Kec. Garum	-8,0721	112,2177
c.	Masjid Jami Darussalam Garum	Dadapan, Sumberdiren, Kec. Garum	-8,073	112,2121
d.	Seminari Menengah St. Vincentius	Jurangmenjing, Garum, Kec. Garum	-8,0733	112,226
e.	Ponpes Nurul Iman Garum	Jl. Raya Garum, Ngebra, Tawangsari, Kec. Garum	-8,0727	112,2184
8	Kecamatan Kanigoro			
a.	Masjid Besar Darussalam Kanigoro	Jl. Raya Tlogo, Jajar, Kanigoro, Kec. Kanigoro	-8,1298	112,2178
b.	Ponpes Al Muslihuun	Jl. Raya Tlogo No.II, Tlogo 2, Tlogo, Kec. Kanigoro	-8,1242	112,2028

BAB III

PERMASALAHAN, ISU – ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar telah dianalisa berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal yang disajikan di Bab II. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berikut adalah tabel identifikasi permasalahan pada pelaksanaan tugas dan fungsi dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi yang belum maksimal - Kurangnya kualitas konten informasi publik yang memadai - Belum terpenuhinya aplikasi yang	• Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bitar; • Belum optimalnya penyebaran informasi citra positif pemerintah di media massa untuk menangkal berita

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		memenuhi standart teknis pembangunan aplikasi - Belum maksimalnya perangkat daerah yang terlayani infrastruktur TIK	hoax; • Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat; • Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat; • Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah; • Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar; • Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE; • Belum optimalnya pemerataan fasilitas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			akses informasi publik dan internet sehat; • Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju <i>e-commerce</i>; • Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya <i>Smart City</i>; • Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan komunikasi dan informatika.
2	Ketersediaan Data Statistik yang berkualitas dan tepat waktu	- Belum maksimalnya ketersediaan data statistik yang terintegrasi guna pengambilan kebijakan pembangunan daerah	• Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah; • Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah; • Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			statistik pembangunan daerah; • Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah.
3	Kualitas layanan persandian	- Belum optimalnya pemanfaatan persandian sebagai pengamanan informasi dan sistem informasi pemerintah daerah	• Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bitar; • Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan; • Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi; • Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Blitar periode 2021-2026

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar harus mengacu pada visi misi dan program Kabupaten Bitar. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bitar Tahun 2021-2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Kabupaten Blitar terdiri dari 22 (dua puluh dua) kecamatan yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi geografis dan topografis di masing-masing wilayah. Dari kondisi tersebut Kabupaten Blitar mengidentifikasi kebijakan pokok yang berpengaruh kuat dan harus dilaksanakan pada periode 2021-2026 sehingga tersusunlah isu strategis. Isu Strategis Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya Pemerataan Akses dan pemenuhan standar layanan pendidikan serta pengembangan pendidikan karakter terintegrasi dengan pendidikan formal.
2. Tantangan untuk memperluas layanan kesehatan dan kualitas fasilitas kesehatan yang memiliki standarisasi tersertifikasi.
3. Pentingnya Perhatian terhadap pemenuhan Gizi Anak di bawah usia 5 tahun berbasis kesadaran kesehatan keluarga.
4. Pentingnya pengembangan UMKM, Pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menghadirkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan meningkatkan PAD.
5. Pentingnya keberpihakan pada petani, ketersediaan sarana produksi pertanian dan industri olahan hasil pertanian untuk menumbuhkan produksi dan produktivitas sektor pertanian.
6. Mengakselerasi pembangunan kawasan strategis dengan menyediakan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan sarana prasarana dasar.
7. Penyediaan Sarana dan Prasarana daya dukung lingkungan dalam rangka kesiapan bencana dan pencemaran lingkungan.
8. Tantangan penyediaan infrastruktur dasar rumah layak huni, sanitasi layak, dan ketersediaan air bersih.

9. Pentingnya mengintegrasikan treatment pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berorientasi pada keberdayaan masyarakat miskin.
10. Terhadap keberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, keberpihakan difabel , dan penyandang kesejahteraan social.
11. Sarana dan Prasarana daya dukung lingkungan dalam rangka penyediaan kesiapan bencana dan pencemaran lingkungan.
12. Tantangan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Dari isu strategis tersebut Bupati dan Wakil Bupati Blitar menentukan VISI **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR)”**. Visi pembangunan tersebut kemudian dideterminasikan ke dalam 4 (empat) misi pembangunan, yang terdiri dari:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya;
2. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi, dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar;
3. Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel Inovatif dan Berintegritas; serta
4. Percepatan Pembangunan melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan.

Visi dan misi pembangunan tersebut kemudian diejawantahkan menjadi Panca Bhakti, yang terdiri dari:

1. Jaminan Pendidikan Masyarakat Desa;
2. Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat serta Perlindungan Ibu dan Anak;
3. Pelayanan Publik berbasis E-Government;
4. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah; dan
5. Pesona Blitar Raya

Dari 4 (empat) Misi tersebut yang sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten

Blitar adalah Misi yang ke 3 (tiga), yaitu **“Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel Inovatif dan Berintegritas”** dengan Tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas, dengan Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Untuk kemudian mendukung tercapainya indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi yang dibagi ke dalam dua sasaran utama yaitu :

3. Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa yang dicapai dengan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat;
4. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dicapai dengan indikator :
 - f. Nilai SAKIP
 - g. Indeks Profesionalisme Aparatur
 - h. Indeks SPBE
 - i. Indeks Inovasi Daerah dan
 - j. Persentase Desa Mandiri

Dari penjabaran sasaran ke dua dan indikatornya terlihat jelas bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mendukung pencapaian Indeks SPBE Kabupaten Blitar. Sedangkan terkait program Panca Bhakti dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mendukung Panca Bhakti ke-3 yaitu *pelayanan publik berbasis **e-government*** yang tergambar dalam konsep program Internet Sambung Desa.

III.1.1.1 Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : <i>TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR)</i>			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel Inovatif dan Berintegritas	Pelayanan Publik berbasis E-Government	6. Pandemi covid-19 menyebabkan permintaan fasilitas yang overload sehingga	6. Adanya Peraturan Bupati Blitar tentang kedudukan, susunan organisasi,

Visi : <i>TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR)</i>			
Misi	Program Bupati- Wakil Bupati Terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		sumber daya manusia tidak sebanding dengan beban tugas dan kurang fokus dalam menjalankan tupoksi utama dinas; 7. Kurang meratanya kemampuan IT sumber daya manusia pada dinas dan terbatasnya sarana dan prasarana/peralatan menyebabkan kurang maksimalnya pencapaian kinerja; 8. Terbatasnya regulasi yang mengatur pengembangan TIK, informatika dan telekomunikasi; 9. Terkait implementasi Sistem Pemerintahan	uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; 7. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal; 8. Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal; 9. Adanya dana dan dukungan

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR)			
Misi	Program Bupati- Wakil Bupati Terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Berbasis elektronik (SPBE) masih ditemukan beberapa kendala mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan serta review yang belum maksimal; 10. Terkait pemadanan data untuk menuju Satu Data Indonesia, masih banyak terdapat permasalahan pemadanan dan pemanfaatan data lintas sektoral di lingkup pemerintah daerah kabupaten Blitar.	dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut pemerataan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; 10. Adanya sarana dan prasarana sebagai modal utama pelaksanaan kegiatan.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi Jawa Timur

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai *leading sektor* di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2020-2024 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, digitalisasi penyiaran televisi, dan *Government Public Relations* (GPR).

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2020-2024, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu **“Indonesia yang Maju Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, dan 4 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan WakilPresiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan focus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Tabel 3.3.1
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, terhadap sasaran Renstra K/L

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
• Meningkatkan cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau; • Meningkatkan cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital; • Meningkatkan konektivitas layanan pos; • Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional; • Meningkatkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika; • Meningkatkan pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis; • Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital; • Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah; • Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan • Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang	- Belum kuatnya regulasi terkait pengelolaan teknologi komunikasi dan informasi di wilayah; - Belum optimalnya keberhasilan literasi digital terhadap masyarakat kabupaten Blitar; - Belum optimalnya cakupan jaringan internet meskipun sudah tidak terdapat blindspot di wilayah kabupaten Blitar; - Belum maksimalnya dukungan sumber daya TIK terhadap implementasi pemanfaatan TIK pada berbagai sektor; - Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan kementrian/lembaga pembina guna menyelaraskan program dan kegiatan - Belum meratanya kemampuan SDM dalam mengolah/menyajikan informasi positif/penangkal hoax - Belum optimalnya penerapan manajemen komunikasi pemerintah di era digital	- Komitmen pimpinan yang kuat untukmelaksanakan pelayanan secara optimal bagi masyarakat; - Dukungan pembiayaan yang memadai dari pemerintah daerah; - Etos kerja sumber daya manusia yang cukup tinggi dalam melaksanakan pelayanan TIK kepada masyarkat

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
baik.		

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Untuk mewujudkan pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang optimal Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar berusaha untuk meyelaraskan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sehingga upaya-upaya yang ditempuh oleh Dinas Komunikasai dan Informatika Kabupaten Blitar dapat dilaksanakan secara optimal. Dari beberapa penyelarasan tersebut ada beberapa sasaran strategis yang sesuai dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, yaitu :

Tabel 3.3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, terhadap Sasaran Renstra Provinsi Jawa Timur

Sasaran Renstra Propinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur - Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercay dan berkualitas	- Belum tersedianya pengukuran kinerja yang memadai (aplikasi pengukuran kinerja yang tepat guna); - Belum optimalnya pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelayanan publik disebabkan belum meratanya literasi digital bagi masyarakat; - Belum optimalnya pelaksanaan Satu Data Kabupaten Blitar; - Belum meratanya pengetahuan dan literasi terkait kemanan informasi pada sistem	- Komitmen pimpinan yang kuat untukmelaksanakan pelayanan secara opyimal bagi masyarakat; - Dukungan pembiayaan yang memadai dari pemerintah daerah; - Etos kerja sumber daya manusia yang cukup tinggi dalam melaksanakan pelayanan TIK kepada masyarkat

Sasaran Renstra Propinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
- Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.	

Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Atau dalam kata lain integrasi data merupakan proses mengkombinasikan dua atau lebih set data agar mempermudah dalam berbagi dan analisis, dalam rangka mendukung manajemen informasi di dalam sebuah lingkungan kerja. Integrasi data menggabungkan data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data (*data warehouse*).

Ketersediaan data merupakan hal yang sangat vital dalam hal pengambilan keputusan di level pengambil keputusan (pimpinan). Akan tetapi, dalam kenyataannya ternyata tidak terbatas pada ketersediaan data, ketepatan, kecepatan dan keakuratan data merupakan hal yang harus menjadi instrument penting dalam data tersebut. Sehingga data tersebut merupakan data yang valid untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Permasalahan muncul pada saat proses pengambilan keputusan, pengawasan dan pelaporan yang diharapkan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat akan tetapi tidak dapat dilakukan hanya karena setiap aplikasi sistem informasi tersebut berdiri sendiri (parsial), dan dalam proses pengembangannya tidak memperhatikan faktor integrasi.

Keuntungan dari integrasi sistem ini adalah membaiknya suatu arus informasi dalam sebuah organisasi. Suatu pelaporan biasanya

memang memerlukan waktu, namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan. Keuntungan ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan (mengunggulkan) sistem informasi terintegrasi karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat.

Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan. Keuntungan ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan (mengunggulkan) sistem informasi terintegrasi karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat.

➤ **MANFAAT INTEGRASI DATA**

1. Data yang sama dapat dipakai bersama antar bagian organisasi (antar instansi) sehingga tidak terjadi *redundancy* data yang bisa memperlambat kinerja database.
2. *Single source of truth*, jadi anda tidak harus kewalahan untuk mencari data di beberapa sistem yang berbeda-beda. Contoh : ketika seorang pegawai pindah tempat kerja melalui mekanisme mutasi pegawai, maka ketika BKPSDM melakukan entry data pegawai tersebut, maka secara otomatis data yang ada di aplikasi BPKAD juga sudah berubah.
3. Kapabilitas pimpinan dipandang menjadi konsisten, ketika pegawai dapat dengan yakin melakukan pekerjaannya dan tidak tersesat dalam sistem.
4. Database yang tertata rapi, seseorang bisa *men-generate reporting* dengan mudah dan mencari data atau history anda dengan cepat.
5. *User interface* menjadi lebih konsisten, ketika anda memiliki *single platform* sistem yang terintegrasi, hal ini menjadi sangat penting, karena user (pegawai baru/lama) dapat dengan mudah membiasakan diri dengan sistem dan tidak perlu belajar atau kebingungan dengan sistem yang berbeda-beda ataupun baru.

➤ **INISIASI KPK MENUJU INTEGRASI DATA**

Penyelenggaran pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terwujud dalam kerangka *e-government* dipandang

sebagai sebuah cara mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan mengedepankan aspek akuntabilitas serta transparansi. Hal tersebut telah mendorong Komisi Pencegahan Korupsi untuk melakukan inisiasi kegiatan yang diimplementasikan melalui aplikasi *East Java Smart Province* dan *e-government* antara Provinsi Jawa Timur dengan 38 Kabupaten/Kota.

KPK memandang dengan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan terintegrasi-nya semua aplikasi yang ada akan sangat efektif mencegah terjadinya korupsi. Hal ini sejalan dengan tugas pokok KPK itu sendiri yaitu pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring dan penindakan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Dinas Kominfo Prov. Jatim mempunyai komitmen untuk mengintegrasikan data seperti E-Master (Elektronik Remunerasi Kinerja), E-Planning, E-budgeting, E-Sakip yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah serta Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari perspektif teknologi informasi dan komunikasi senantiasa mengalami perubahan yang dinamis dan konstruktif. Teknologi informasi yang sebelumnya tidak ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan lalu hadir dan telah menjadi *tools* dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan terutama dalam aspek pelayanan publik. Setelah itu terwujud ternyata dipandang belum optimal karena menyisakan permasalahan serta kesulitan untuk menentukan data mana yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan, hal ini terjadi karena masing-masing sistem berdiri sendiri (*parsial*).

Kemudian lahirlah konsep integrasi yang dipandang dapat mengedepankan efektivitas, efisiensi serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas melalui pola hubungan *Government to Citizen*, *Government to Business* dan *Government to Government*.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bitar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031.

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar berdasarkan Sasaran Renstra Kajian Lingkungan yaitu belum meratanya penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bitar. Kabupaten Bitar yang terdiri dari 22 Kecamatan dan 248 desa/kelurahan dimana sebaran penduduknya kurang merata dengan kondisi geografis alam yang ekstrim pada dasarnya memiliki kekurangan dan kelebihan untuk pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Telaah keselarasan RTRW dalam RPJMD nampak dalam program yang dilaksanakan oleh dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar antara lain :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Dimana dalam pelaksanaannya dirumuskan dalam bentuk peningkatan sistem informasi wisata dengan lokasi : obyek wisata di Kabupaten Blitar.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS ini selanjutnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan KLHS RPJMD berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) termuat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bitar. Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS, yakni penguatan pelaksanaan dan pengawasan programprogram ramah lingkungan yang telah direncanakan, salah satunya pengawasan pemanfaatan ruang terkait pengembangan infrastruktur telekomunikasi.

Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dapat digambarkan sebagai berikut :

RUMUSAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMECAHAN PERMASALAHAN/ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Blitar

NO	ISU STRATEGIS RANTEK RPJMD 2021-2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM (OUTCOME)	PENJELASAN/JUST IFIKASI
1	2	3	4	5	6
1.	Tantangan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Meningkatkan Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyediaan infrastruktur teknologi informasi, dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi	Penguatan Tatakelola SPBE, infrastruktur, dan sumber daya teknologi informasi	Indeks SPBE Pemerintah Daerah	Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2019 sebesar 2,9 dengan Kategori Baik, sehingga perlu ditingkatkan ke level Sangat Baik (3,5 – 4,2) hingga Memuaskan (4,2 – 5,0)

**PEMETAAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN OUTPUT SPESIFIK
PEMECAHAN PERMASALAHAN/ISU STRATEGIS
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022**

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Blitar

INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM (OUTCOME)	PROGRAM (PMDN No. 90 TAHUN 2019)	KEGIATAN (PMDN No. 90 TAHUN 2019)	OUTPUT	SUB KEGIATAN (PMDN No. 90 TAHUN 2019)	OUTPUT SPESIFIK
1	2	3	4	5	6
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4. Pengelolaan e-governmen Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedian ya infrastruktur SPBE terintegrasi Tersedian ya Tatakelola SPBE, Aplikasi SPBE, serta implementasi dan monitoring SPBE	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 4. Pengembangan dan Pengelolaa n Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jaringan terintegrasi dan infrastruktur TIK untuk layanan SPBE 3. Aplikasi SPBE 4. Tatakelola SPBE (Master Plan, Regulasi, dan Tim SPBE) 3. Sosialisasi , Workshop, Implementasi SPBE 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas RTIK, Pandu Digital, Saka Kominfo

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan telaah dan identifikasi masalah mengenai Tugas dan Fungsi pelayanan OPD, telaah visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Blitar serta telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Kominfo Provinsi Jawa Timur, serta telaah RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyediaan infrastruktur teknologi informasi, dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi;

Isu ini ditempuh melalui peningkatan kualitas SDM ASN dalam bidang TIK, literasi digital yang masif kepada masyarakat salah satunya melalui pemberdayaan relawan TIK dan mendorong penerapan teknologi masa depan yang mendorong perubahan SPBE (*mobile internet, cloud computing, internet of things, big data analitics, dan artificial intelligence*), serta pentingnya konsolidasi distribusi bandwidth di lingkungan OPD Kabupaten Blitar.

2. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik; Isu ini ditempuh melalui pemerataan kemampuan SDM dalam mengolah/menyajikan informasi positif/penangkal hoax, meningkatkan literasi digital kepada masyarakat, dan pengoptimalan penerapan manajemen komunikasi pemerintah di era digital;

3. Peningkatan Pengelolaan Satu Data (One Data) Kabupaten Blitar dan optimalisasi sistem integrasi data statistik sektoral daerah, dimana dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai wali data yang memiliki tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi seluruh perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan daerah; Isu ini ditempuh melalui terbangunnya data center yang baik dan terintegrasi, pembinaan dan penguatan regulasi terkait pemanfaatan data yang dihasilkan oleh seluruh OPD;

4. Meningkatkan Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi;

Isu ini ditempuh melalui pemerataan pengetahuan dan literasi terkait kewanmanan informasi pada sistem informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang sudah menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi dan standar SNI ISO/IEC 27001.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 oleh dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya yang diformulasikan kedalam tujuan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Dalam perumusan tujuan strategis juga memungkinkan organisasi untuk mengukur sejauh mana visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dicapai. Untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur sehingga apa yang menjadi cita-cita Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 dapat terwujud.

Selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai, sebagai berikut :

Visi :

**"TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA
BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WA
ROBBUN GHOFUUR)",**

Dari visi tersebut, dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi antara lain :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya;

2. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi, dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar;
3. Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel Inovatif dan Berintegritas; serta
4. Percepatan Pembangunan melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah.

Pengejawantahan misi agar lebih implementatif, kemudian ditetapkan janji politik yang disebut sebagai “Panca Bhakti Mak Rini Pakde Rahmat” yang terdiri dari :

1. Jaminan Pendidikan Masyarakat Desa;
2. Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat serta Perlindungan Ibu dan Anak;
3. Pelayanan Publik berbasis E-Government;
4. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah; dan
5. Pesona Blitar Raya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar mengemban misi ketiga yaitu :

“Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel Inovatif dan Berintegritas”

Bertolak dari pernyataan visi, misi serta Panca Bhakti yang ingin dicapai serta untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terwujudnya pemerintahan yang baik dan terpercaya maka dalam pelaksanaannya sangat diperlukan adanya konsistensi perencanaan yang strategis dalam mencapai masa depan yang diinginkan.

Konsistensi ini diawali dengan penetapan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 yaitu :

“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Memanfaatkan Teknologi Informasi, Komunikasi dan Data Secara Efektif, Efisien dan Berkesinambungan”

4.1.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka ditetapkan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Blitar dan merupakan hasil yang diharapkan dengan memperhatikan indikator kinerja dari tujuan perencanaan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun sasaran yang dilaksanakan secara berkelanjutan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Penjabaran dari uraian tujuan, sasaran, indikator sasaran beserta target kinerja selama lima tahun kedepan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 4.1.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE	Nilai Tata Kelola SPBE	0	4,20	4,22	4,25	4,27	4,30	4,32	4,32
			Nilai Layanan SPBE	0	4,27	4,28	4,29	4,30	4,32	4,34	4,34

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

5.1.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah upaya yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi yang dapat ditentukan dengan analisis SWOT yaitu menelaah pada faktor internal OPD (Kekuatan dan Kelemahan) dan faktor eksternal OPD (Tantangan dan Peluang). Berikut analisa penentuan strategi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar:

Tabel. 5.1
Matriks Analisis SWOT

	KEKUATAN	KELEMAHAN
ISU STRATEGIS	1. Adanya Peraturan Bupati Blitar tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika; 2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal; 3. Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal; 4. Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut pemerataan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; 5. Adanya sarana dan prasarana sebagai modal utama pelaksanaan kegiatan.	1. Kurang meratanya kemampuan IT sumber daya manusia pada dinas dan terbatasnya sarana dan prasarana/peralatan menyebabkan kurang maksimalnya pencapaian kinerja; 2. Terbatasnya regulasi yang mengatur pengembangan TIK, informatika dan telekomunikasi; 3. Terkait implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) masih ditemukan beberapa kendala mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan serta review yang belum maksimal; 4. Terkait pemadanan data untuk menuju Satu Data Indonesia, masih banyak terdapat permasalahan pemadanan dan pemanfaatan data lintas sektoral di lingkup pemerintah daerah kabupaten Blitar. 5. Belum optimalnya cakupan jaringan internet meskipun sudah tidak terdapat blindspot di wilayah kabupaten Blitar; 6. Belum maksimalnya dukungan sumber daya TIK terhadap implementasi pemanfaatan TIK pada berbagai sektor; 7. Belum optimalnya penerapan

			manajemen komunikasi pemerintah di era digital 8. Belum tersedianya pengukuran kinerja yang memadai (aplikasi pengukuran kinerja yang tepat guna); 9. Belum meratanya pengetahuan dan literasi terkait kemandirian informasi pada sistem informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
PELUANG	- Kemajuan teknologi informasi ; - Keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh informasi ; - Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat ; - Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat (komunikasi) - Media massa, elektronik dan online yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta ; - Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif ; - Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara. - Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf;	Pengoptimalan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I)	Peningkatan Komunikasi Publik (II)
TANTANGAN	- Belum optimalnya penyelenggaraan <i>e-government</i> ; - Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten dan Perangkat daerah terintegrasi dan terupdate ; - Konten hoax yang beredar di masyarakat ; - Semakin cerdasnya masyarakat terkait kebutuhan akan informasi (Keberadaan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik; - Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan	Peningkatan Pelayanan Persandian (IV)	Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Statistik. (III)

informasi ;		
6. J aminan keaman an sistem TIK;		
7. Belum tersedianya satu data yang terintegrasi ;		
8. Masih rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional khususnya yang menguasai bidang IT (Analisis, Aplikasi, Database, Pemograman dan Jaringan).		

Berdasarkan kajian penentuan strategi maka dapat diketahui strategi kedepan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsi OPD adalah sebagai berikut:

1. Pengoptimalan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Strategi S-O).
2. Peningkatan Komunikasi Publik (Strategi W-O).
3. Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Statistik (Strategi W-T).
4. Peningkatan Pelayanan Persandian (Strategi S-T)

9.1.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Kebijakan disusun sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar merupakan langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi dan yang selaras dengan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Blitar.

Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR)		
Misi	Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel Inovatif dan Berintegritas		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Pemerintahan dengan Pengoptimalan Penerapan SPBE dalam Pelayanan Publik yang Terintegrasi	Meningkatnya Indeks SPBE	Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada ruang publik; - Meningkatkan pembangunan aplikasi sesuai standart SPBE untuk mewujudkan <i>e-government</i> terintegrasi; - Meningkatkan pengetahuan pengelolaan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Aparatur; - Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk mendukung <i>e-government</i>.
		Peningkatan Komunikasi Publik	- Meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi penangkalan berita hoax; - Meningkatkan Literasi Digital kepada Masyarakat; - Meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat
		Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Statistik	- Meningkatkan Pengelolaan Media Informasi Pemerintah; - Mengoptimalkan Penerapan Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Diital - Meningkatkan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah melalui Berbagai Media;

Visi	TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR)		
Misi	Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel Inovatif dan Berintegritas		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			- Meningkatkan Kerjasama dengan BPS dalam Penerbitan Produk Data Statistik; - Membangun Data Center yang baik dan Terintegrasi; - Meningkatkan Pembinaan dan Penguatan Regulasi terkait Pemanfaatan Data seluruh Perangkat Daerah.
		Peningkatan Pelayanan Persandian	- Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Persandian dan Telekomunikasi; - Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika; - Meningkatkan Pemerataan Pengetahuan dan Literasi terkait Keamanan Sistem Informasi yang Berpedoman pada Indeks Kemanan Informasi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (ouput) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar guna mencapai sasaran tertentu. Dengan program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dalam lima tahun kedepan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar merencanakan 5 (Lima) program antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
3. Pelayanan Informasi Publik

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yaitu :

a Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh
. Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

b Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah
. Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
4. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2. Membangun Metadata Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu :

- a Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- 1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Mengingat pernyataan suatu hasil menyatakan apa yang ingin dicapai, indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuannya telah tercapai. Indikator biasanya merupakan ukuran kuantitatif, tetapi bisa juga berupa pengamatan kualitatif. Indikator tersebut menentukan bagaimana kinerja akan diukur menurut suatu skala atau dimensi, tanpa menjelaskan secara spesifik suatu tingkat pencapaian tertentu. Setiap indikator kinerja perlu didefinisikan secara jelas untuk setiap pernyataannya. Hal ini sangat penting bagi setiap OPD untuk memahami terhadap indikator kinerja yang dibuat, sehingga akan membantu dalam pengambilan keputusan pada setiap evaluasi yang dilakukan.

Pengukuran kinerja didasarkan kepada penetapan indikator kinerja, bobot masing – masing indikator dari capaian indikator dimaksud. Sedangkan pencapaian indikator kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data (informasi) untuk menentukan kinerja kegiatan yang didasarkan pada masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), Indikator manfaat (benefit) dan indikator dampak (impact). Indikator pembangunan merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian misi Kabupaten Blitar.

Kelompok Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar adalah masyarakat dan OPD yang berkaitan dengan Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sedangkan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
												Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	2	16	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	90	90	3,800,857,259	92	3,341,621,000	94	3,984,908,300	96	3,995,200,731	98	4,019,039,374	98	16,834,054,775	Sekretariat	Kab.Bitar

Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasara n	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikato r Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan , dan Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
											Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung jawab	Lokas i			
											Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp			
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
				2		16	2		02.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentas e dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Persen	90	90	1,319,000	92	2,150,000	94	3,700,000	96	4,500,000	98	5,000,000	98	5,000,000	Sekretri at	Kab.B litar

Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasara n	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikato r Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan , dan Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung jawab	Lokas i
											Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2	16	2	02 . 02	Kegiatan Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Persentas e Laporan Administra si Keuanga n Perangka t Daerah yang Tepat Waktu dan Akuntabe l	Pers en	90	90	2,803,04 1,214	92	2,805,0 41,214	94	2,846,0 41,214	96	2,846,0 41,214	98	2,930,04 1,214	98	14,230, 206,07 0	Sekre tariat	Kab.B litar

Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasara n	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikato r Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan , dan Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung jawab	Lokas i
											Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2	16	2	02.03	Kegiatan Administrasi Umum yang Dilaksanakan Secara Akuntabel	Persentase Administrasi Umum yang Dilaksanakan Secara Akuntabel	Persen	90	100	256,781,745	100	240,713,000	100	256,781,745	100	259,881,745	100	278,781,745	100	1,292,939,980	Sekretariat	Kab.Bitar

Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasara n	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikato r Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan , dan Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
												Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung jawab	Lokas i			
												Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp					
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
			2	1	6	1	0	1	0	5	Kegiatan Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Persentas e ASN yang Mendapa t Pelayana n Administra si Kepegaw aian Perangka t Daerah	Pers en	90	90	256,781, 745	92	256,78 1,745	94	256,78 1,745	9 6	256,78 1,745	9 8	278,781, 745	9 8	1,305,9 08,725	Sekre tariat	Kab.B litar

Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasara n	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikato r Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan , dan Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	
											Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung jawab	Lokas i				
											Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp						
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
			2	1	6	1	0	1	0	7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentas e Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah yang tepat sasaran	Pers en	90	90	160,000, 000	92	59,169, 000	94	274,47 3,000	9 6	275,85 4,000	9 8	250,500, 345	9 8	1,019,9 96,345	Sekreta riat	Kab.B litar

Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasara n	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikato r Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan , dan Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
											Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung jawab	Lokas i	
											Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			2	1	6	1	01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentas e penyedia an jasa penunjan g urusan pemerint ah daerah yang disedaiak an tepat waktu	Pers en	90	90	184,310,000	92	118,500,000	94	196,310,000	96	196,310,269	98	200,042,100	98	895,472,369	Sekreta riat	Kab.B litar

Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasara n	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikato r Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan , dan Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
												Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung jawab	Lokas i			
												Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp					
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
			2	1	6	1	0	1	0	9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Persen	90	90	138,623,555	92	116,047,786	94	151,820,596	96	155,831,731	98	138,623,555	98	700,947,223		
	Meningkatny	Nilai																										

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	a Tata Kelola dan Layanan SPBE	Tata Kelola SPBE dan Nilai Layanan SPBE	2	16	2		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	Persen	83%	83	2,220,433,442	86	2,286,341,323	88	2,784,672,653	90	2,799,613,610	90	3,234,218,860	90	13,325,279,888	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab.Bitar

Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasara n	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikato r Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan , dan Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
								Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung jawab	Lokas i			
								Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
			2	16	2	02 · 01	Kegiatan Pengelolaa n Informasi dan Komunikas i Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah layanan Informasi	Beri ta	300	300	2,220,43 3,442	300	2,286,3 41,323	300	2,784,6 72,653	300	2,799,6 13,610	300	3,234,21 8,860	300	13,325, 279,888	Bidang Informa si dan Komuni kasi Publik	Kab.B litar

Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasara n	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikato r Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan , dan Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung jawab	Lokas i
											Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2	16	3																			
																						</		

Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasara n	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikato r Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan , dan Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung jawab	Lokas i
											Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Persenta se Perangka t Daerah yang Terlayan i Infrastru ktur TIK	Per sen	100	100		100		100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
								Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			21630201	Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi jaringan backbone pemkab blitar	OPD	52	52	5,914,456,200	52	6,214,456,200	52	6,323,567,288	52	6,426,326,937	52	6,906,326,937	52	31,785,133,562	Seksi Infrastruktur, Kemanan Informati dan Persandian	Kab.Blitar

VI-17

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
								Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2	16	3	02.02	Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	Kebijakan	19	19	828,614,927	19	838,259,078	19	888,259,078	19	908,259,078	19	980,973,462	29	4,444,365,624	Bidang Informatika	Kab.Bitar

Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasara n	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikato r Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan , dan Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	
											Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung jawab	Lokas i				
											Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta r g e t	Rp	Ta r g e t	Rp	Ta r g e t	Rp	Ta r g e t	Rp				
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
				2	2	0	2	0	1		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah survey statistik sektoral dan kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	kali	2	2	1,000,000,000	2	500,000,000	2	650,000,000	2	700,000,000	2	750,000,000	2	3,600,000,000	Bidang Data dan Statistik	Kab.Bitar

Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasara n	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikato r Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan , dan Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
											Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung jawab	Lokas i	
											Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp			
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			2	1	6	3		PROGRAM PENYELEN GGARAAN PERSANDI AN UNTUK PENGAMA NAN INFORMAS I	Persenta se Tingkat Keamana n Informas i Pemerint ah	Per sen	100	100	6,227,158.00	100	9,692,254	100	10,323,118	100	15,342,032	100	17,385,851	100	58,970,413	Bidang Inform atika	Kab.B litar

Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasara n	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikato r Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan , dan Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
												Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung jawab	Lokas i			
												Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta r g e t	Rp	Ta r g e t	Rp	Ta r g e t	Rp					
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
				2		21	2		02.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	Persen	60	65	6,227,158	70	9,692,254	75	10,323,118	80	15,342,032	85	17,385,851	85	58,970,413	Bidang Informatika	Kab.Bitar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Sehingga indikator kinerja lembaga atau unit kerja, perlu dirancang metode atau teknik dan tata cara yang jelas dan sistematis sebagai instrumen penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bitar tahun 2021-2026. Target indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar.

Pengukuran kinerja didasarkan kepada penetapan indikator kinerja, bobot masing – masing indikator dari capaian indikator dimaksud. Sedangkan pencapaian indikator kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data (informasi) untuk menentukan kinerja kegiatan yang didasarkan pada masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), indikator manfaat (benefit) dan indikator dampak (impact).

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar memiliki indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Blitar. Indikator pembangunan merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian misi Bupati/Wakil Bupati terpilih.

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, karena Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengampu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang mengerucut pada layanan berbasis teknologi informasi sehingga ada keterkaitan dengan Misi-3 yaitu Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel Inovatif dan Berintegritas.

Indikator Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 adalah seperti tertuang dalam tabel 7.1. berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:								
	Indikator Tujuan: Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan penerapan SPBE dan pelayanan publik terintegrasi								

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Persentase layanan publik yang sesuai dengan standar SPBE							
		Indikator Sasaran (IKU Dinas):							
		Nilai Tata Kelola SPBE	0	4,2	4,22	4,25	4,27	4,3	4,32
		Nilai Layanan SPBE	0	4,27	4,28	4,29	4,3	4,32	4,34
II		INDIKATOR PROGRAM:							
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	90%	90%	90%	92%	94%	96%	98%
	2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik							
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi (hasil survey IKM)	0%	83%	83%	86%	88%	90%	90%
	3	Program Aplikasi Informatika							
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0%	40%	40%	50%	70%	90%	90%
		Persentase perangkat daerah yang terlayani infrastruktur TIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral							
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	0%	60%	60%	70%	80%	90%	90%
	5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
III	INDIKATOR KEGIATAN:								
	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun	90%	90%	90%	92%	94%	96%	98%	98%
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	90%	90%	90%	92%	94%	96%	98%	98%
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	90%	90%	92%	94%	96%	98%	98%
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	90%	90%	90%	92%	94%	96%	98%	98%
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	90%	90%	90%	92%	94%	96%	98%	98%
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	90%	90%	90%	92%	94%	96%	98%	98%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	90%	90%	90%	92%	94%	96%	98%	98%
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai STRAKOM	0%	83%	86%	88%	90%	90%	90%	90%
	Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota								
	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota								
	Jumlah regulasi / kebijakan TIK terkait implementasi e-government	19 kebijakan	19 kebijakan	20 kebijakan	21 kebijakan	22 kebijakan	23 kebijakan	23 kebijakan	23 kebijakan

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
11	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota								
	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	52 OPD	52 OPD	52 OPD	52 OPD	52 OPD	52 OPD	52 OPD	52 OPD
	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota								
12	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip aplikasi persandian	0	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%

Pohon Kinerja OPD adalah salah satu logframe yang menggambarkan tanggungjawab berjenjang (cascading) terkait dengan capaian kinerja OPD. Berikut adalah Pohon Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar :

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Eselon II ← Impact
SASARAN RKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
INDIKATOR SASARAN	Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE	
TUJUAN	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	Eseleon III ← Outcome
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Indeks SPBE Persentase Layanan Publik yang sesuai dengan standar SPBE	
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	
KEGIATAN	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Eselon II ← Impact
SASARAN RKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
INDIKATOR SASARAN	Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE	
TUJUAN	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	Eseleon III ← Outcome
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Indeks SPBE Persentase Layanan Publik yang sesuai dengan standar SPBE	
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	
KEGIATAN	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat	

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Eselon II ← Impact
SASARAN RKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
INDIKATOR SASARAN	Nilai Indeks SPBE Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE	
TUJUAN	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	Eselon III ← Outcome
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Indeks SPBE Persentase Layanan Publik yang sesuai dengan standar SPBE	
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	
KEGIATAN	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat	

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Eselon II ← Impact
SASARAN RKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
INDIKATOR SASARAN	Nilai Indeks SPBE Nilai Indeks SPBE Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE	
TUJUAN	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	Eselon III ← Outcome
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Indeks SPBE Persentase Layanan Publik yang sesuai dengan standar SPBE	
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	
KEGIATAN	Kegiatan Administrasi Umum	
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Administrasi Umum yang Dilaksanakan Secara Akuntabel	

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
SASARAN RKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Eselon II ← Impact
INDIKATOR SASARAN	Nilai Indeks SPBE Nilai Indeks SPBE Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE	
TUJUAN	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Indeks SPBE Persentase Layanan Publik yang sesuai dengan standar SPBE	
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	
KEGIATAN	Kegiatan Administrasi Umum	Eselon III ← Outcome
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Administrasi Umum yang Dilaksanakan Secara Akuntabel	

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
SASARAN RKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Eselon II ← Impact
INDIKATOR SASARAN	Nilai Indeks SPBE Nilai Indeks SPBE Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE	
TUJUAN	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Indeks SPBE Persentase Layanan Publik yang sesuai dengan standar SPBE	
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	
KEGIATAN	Kegiatan Administrasi Umum	Eselon III ← Outcome
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Administrasi Umum yang Dilaksanakan Secara Akuntabel	

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Eselon II ← Impact
SASARAN RKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
INDIKATOR SASARAN	Nilai Indeks SPBE Nilai Indeks SPBE Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE	
TUJUAN	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	Eseleon III ← Outcome
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Indeks SPBE Persentase Layanan Publik yang sesuai dengan standar SPBE	
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	
KEGIATAN	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian	

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Eselon II ← Impact
SASARAN RKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
INDIKATOR SASARAN	Nilai Indeks SPBE Nilai Indeks SPBE Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE	
TUJUAN	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	Eselon III ← Outcome
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Indeks SPBE Persentase Layanan Publik yang sesuai dengan standar SPBE	
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	
KEGIATAN	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Eselon III ← Outcome
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Eselon II ← Impact
SASARAN RKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
INDIKATOR SASARAN	Nilai Indeks SPBE Nilai Indeks SPBE Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE	
TUJUAN	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	Eselon III ← Outcome
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Indeks SPBE Persentase Layanan Publik yang sesuai dengan standar SPBE	
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	
KEGIATAN	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
SASARAN RKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Eselon II ← Impact
INDIKATOR SASARAN	Nilai Indeks SPBE Nilai Indeks SPBE Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE	
TUJUAN	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Indeks SPBE Persentase Layanan Publik yang sesuai dengan standar SPBE	
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	
KEGIATAN	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Eselon III ← Outcome
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Eselon II ← Impact
SASARAN RKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
INDIKATOR SASARAN	Nilai Indeks SPBE Nilai Indeks SPBE Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE	
TUJUAN	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	Eselon III ← Outcome
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Indeks SPBE Persentase Layanan Publik yang sesuai dengan standar SPBE	
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	
KEGIATAN	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
SASARAN RKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Eselon II ← Impact
INDIKATOR SASARAN	Nilai Indeks SPBE Nilai Indeks SPBE Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE	
TUJUAN	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Indeks SPBE Persentase Layanan Publik yang sesuai dengan standar SPBE	
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	
KEGIATAN	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Eselon III ← Outcome
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
SASARAN RKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Eselon II ← Impact
INDIKATOR SASARAN	Nilai Indeks SPBE Nilai Indeks SPBE Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE	
TUJUAN	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Indeks SPBE Persentase Layanan Publik yang sesuai dengan standar SPBE	
PROGRAM	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
INDIKATOR PROGRAM	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	
KEGIATAN	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Eselon III ← Outcome
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
SASARAN RKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Eselon II ← Impact
INDIKATOR SASARAN	Nilai Indeks SPBE Nilai Indeks SPBE Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE	
TUJUAN	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Indeks SPBE Persentase Layanan Publik yang sesuai dengan standar SPBE	
PROGRAM	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
INDIKATOR PROGRAM	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	
KEGIATAN	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Eselon III ← Outcome
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
SASARAN RKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Eselon II ← Impact
INDIKATOR SASARAN	Nilai Indeks SPBE Nilai Indeks SPBE Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE	
TUJUAN	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Indeks SPBE Persentase Layanan Publik yang sesuai dengan standar SPBE	
PROGRAM	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
INDIKATOR PROGRAM	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	
KEGIATAN	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Eselon III ← Outcome
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
SASARAN RKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Eselon II ← Impact
INDIKATOR SASARAN	Nilai Indeks SPBE Nilai Indeks SPBE Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE	
TUJUAN	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Indeks SPBE Persentase Layanan Publik yang sesuai dengan standar SPBE	
PROGRAM	Program Aplikasi Informatika	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ; Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TIK	
KEGIATAN	Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Eselon III ← Outcome
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
SASARAN RKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Eselon II ← Impact
INDIKATOR SASARAN	Nilai Indeks SPBE Nilai Indeks SPBE Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE	
TUJUAN	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Indeks SPBE Persentase Layanan Publik yang sesuai dengan standar SPBE	
PROGRAM	Program Aplikasi Informatika	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ; Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TIK	
KEGIATAN	Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Eselon III ← Outcome
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah regulasi/kebijakan TIK terkait implementasi e-government	

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
SASARAN RKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Eselon II ← Impact
INDIKATOR SASARAN	Nilai Indeks SPBE Nilai Indeks SPBE Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE	
TUJUAN	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Indeks SPBE Persentase Layanan Publik yang sesuai dengan standar SPBE	
PROGRAM	Program Aplikasi Informatika	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ; Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TIK	
KEGIATAN	Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Eselon III ← Outcome
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah regulasi/kebijakan TIK terkait implementasi e-government	

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
SASARAN RKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Eselon II ← Impact
INDIKATOR SASARAN	Nilai Indeks SPBE Nilai Indeks SPBE Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE	
TUJUAN	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Indeks SPBE Persentase Layanan Publik yang sesuai dengan standar SPBE	
PROGRAM	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	
KEGIATAN	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kab/Kota	Eselon III ← Outcome
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
SASARAN RKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Eselon II ← Impact
INDIKATOR SASARAN	Nilai Indeks SPBE Nilai Indeks SPBE Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE	
TUJUAN	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Indeks SPBE Persentase Layanan Publik yang sesuai dengan standar SPBE	
PROGRAM	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	
KEGIATAN	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kab/Kota	Eselon III ← Outcome
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
SASARAN RKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Eselon II ← Impact
INDIKATOR SASARAN	Nilai Indeks SPBE Nilai Indeks SPBE Nilai Tata Kelola dan Layanan SPBE	
TUJUAN	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Indeks SPBE Persentase Layanan Publik yang sesuai dengan standar SPBE	
PROGRAM	Program Penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	
KEGIATAN	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Eselon III ← Outcome
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip aplikasi	

BAB VIII

P E N U T U P

Rancangan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar Tahun 2021-2026 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Namun meski demikian, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan rancangan renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kabupaten Bitar Tahun 2021-2026, yaitu: ***“Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia. Baldatun, Toyyibbatun, Warobbun Ghofur.”*** dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Rancangan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar Tahun 2021-2026 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bitar dalam RPJMD Kabupaten Bitar 2021-2026.

Blitar,

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN**



EKO SUSANTO, ST, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690701 199703 1 003